

ISU Sepekan

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Minggu ke-2 Oktober 2021 (8 s.d. 14 Oktober)

RASIONALITAS PENENTUAN HARI PENCOBLOSAN

Aryo Wasisto
Peneliti Pertama/Politik & Pemerintahan
aryo.wasisto@dpr.go.id



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**



ISU ATAU PERMASALAHAN

Konsekuensi ditetapkannya Pemilu Serentak dan Pilkada 2024 tahun yang sama menyebabkan Pemerintah dan KPU memiliki pendapat yang berbeda tentang hari pencoblosan. KPU berpendapat bahwa memajukan hari pencoblosan pada 21 Februari 2024 berpengaruh pada terhindarnya kekosongan hasil Pemilu 2024 ketika tahapan Pilkada Serentak dimulai. Selain itu, pemajuan tanggal juga dapat memberi waktu pada proses rekapitulasi dan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi dengan jadwal pencalonan Pilkada 2024, ditambah efektivitas mengurangi beban ad hoc.

Sementara Pertimbangan rasional Pemerintah mengusulkan pemilu digelar pada 15 Mei 2024 adalah persoalan jarak antara pemungutan suara dan pelantikan presiden tidak terlalu jauh sehingga proses transisi pemerintahan berjalan mulus. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memproyeksikan bahwa apabila pemilu diselenggarakan lebih awal akan berdampak pada polaritas yang mendistorsi stabilitas politik dan keamanan pada tingkatan pusat dan daerah. Dua pendapat ini berada dua jalur yang berbeda. KPU berada pada isu teknis sedangkan pemerintah pada antisipasi isu politik secara nasional.



SUMBER

Koran Tempo, 7 Oktober 2021; Kompas.com, 14 Oktober 2021 .